



Dewan Soroti

Selisih Angka 210.850

Ada Perbedaan Jumlah DP4 dengan Data Wajib KTP di DIY

BEDA ANGKA DP4-KTP

- **DIY**
DP4 2.947.700, data wajib KTP di DIY 2.736.850
- **Bantul**
DP4 801.357, data wajib KTP 704.459
- **Kota Yogyakarta**
DP4 304.525, data wajib KTP 309.530
- **Kulonprogo**
DP4 adalah 345.423, data wajib KTP 342.989
- **Gunungkidul**
DP4 666.476, data wajib KTP 592.034
- **Sleman**
DP4 sejumlah 829.519, data wajib KTP 787.958

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif menyoroti besarnya perbedaan antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan data wajib KTP yang dihimpun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh kabupaten-kota di DIY. Hal tersebut terungkap saat Komisi A DPRD DIY melangsungkan rapat kerja dalam rangka membantu KPU, untuk menyusun daftar pemilih pada Pemilu 2019 mendatang, Rabu (2/5) lalu. Perbedaan data yang ditemukan pun memang cukup mencolok.

● ke halaman 19

Kita akan bantu KPU wujudkan data pemilih yang benar dan akurat, untuk menjamin hak konstitusi warga negara Indonesia dalam Pemilu 2019

Eko Suwanto
Ketua Komisi A DPRD DIY

instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut

Dewan Soroti Selisih Angka

• Sambungan Hal 13

Bagaimana tidak, DP4 DIY mencapai 2.947.700, sedangkan data wajib KTP di DIY hanya sejumlah 2.736.850 saja. Jika dijabarkan per kabupaten-kota, DP4 Bantul 801.357, data wajib KTP 704.459. Lalu, DP4 Kota Yogyakarta 304.925, sementara data wajib KTP 309.530.

Kemudian, untuk DP4 Kulonprogo adalah 345.423, dengan data wajib KTP sebanyak 342.869. Selanjutnya, DP4 Gunungkidul 666.476, data wajib KTP 592.034. Sementara di Sleman, DP4 sejumlah 829.519, sedangkan data wajib KTP yang tercatat hanya 787.958 saja.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan, perbedaan DP4 DIY dengan data wajib KTP DIY, mencapai 210.850. Perbedaan data kabupaten-kota yang paling mencolok adalah Bantul, di mana DP4 lebih besar 96.898, dibanding data wajib KTP.

Oleh sebab itu, pihaknya akan memanggil kembali KPU, Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-DIY, untuk mendengarkan penjelasan, mengapa terjadi perbedaan data, serta bagaimana strategi mengatasi masalah perbedaan data tersebut.

"Saat KPU sedang lakukan pencocokan dan penelitian

data pemilih, kita hormati proses cokolit ini. Kita akan bantu KPU wujudkan data pemilih yang benar dan akurat, untuk menjamin hak konstitusi warga negara Indonesia dalam Pemilu 2019," katanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, demokrasi elektoral memberikan kesempatan bagi rakyat, untuk memberikan hak suara. Memilih atau mencoblos dalam pemilihan umum, lanjutnya, merupakan hak asasi, sekaligus hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

"Sehingga, hak memilih tentunya dimiliki oleh mereka, yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan," katanya.

TPS khusus

Selain selisih DP4 dengan data wajib KTP, Eko menuturkan, KPU juga belum mengakomodasi hadirnya TPS khusus, misalnya rumah sakit, lembaga pemsyarakatan dan pusat keramaian lainnya. Sedangkan jumlah sementara TPS di DIY untuk Pemilu 2019 adalah 11.808.

"Kita harapkan KPU dapat menjamin hak konstitusi, termasuk pasien, serta warga lainnya yang bersifat khusus. KPU RI diharapkan melakukan perbaikan PKPU, untuk jadi payung hukum bagi hadirnya TPS khusus," tuturnya.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY tersebut menyatakan, pekerjaan rumah lain

yang harus diselesaikan adalah bagaimana mengakomodasi pelajar dan mahasiswa dari luar DIY, yang pada Pemilu 2019 nanti menggunakan hak pilihnya di Yogyakarta.

"Prinsipnya, hak konstitusi warga negara dalam menggunakan hak pilih harus kita jaga bersama," tandasnya.

Akan tetapi, Eko tidak memungkir, dari hasil rapat kerja yang diselenggarakan di Gedung DPRD DIY itu, pihaknya memberikan catatan khusus terkait selisih DP4 dan data wajib KTP. Menurutnya, permasalahan tersebut, memang menjadi perhatian tersendiri.

"Kita ajak masyarakat, agar aktif memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih Pemilu 2019. Partisipasi masyarakat sangat penting, untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, dengan data pemilih yang benar dan akurat," tuturnya.

Data semester 2

Ketua KPU Bantul, Muhammad Johan Komara, Kamis mengatakan, sistem pemutakhiran data dalam pemilihan KPU ini bersumber dari data dalam DP4 semester kedua tahun 2017, yang kemudian disinkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir (2014).

"KPU sedang memastikan kondisi riil DP4 ini melalui mekanisme cokolit (pencocokan dan penelitian berupa pemutakhiran data pemilih sebagai upaya KPU dalam

melakukan sinkronisasi data. Dimungkinkan akan terjadi reduksi selisih jumlah data selama cokolit ini," kata Johan.

Angka 90 ribu lebih dalam selisih DP4 dan data wajib KTP ini menurut Johan masih mentah. Artinya, masih banyak data yang invalid di angka itu yang berupa data ganda, pemilih yang telah meninggal, di bawah umur, tidak dikenal atau bukan KTP setempat.

Petugas dari KPU, akan mencoret data yang invalid itu melalui cokolit. Sekali lagi, potensi selisih data berkurang akan sangat besar mengingat progres cokolit KPU Bantul masih di angka 50 persen. Baru setelah progres cokolit 100 persen, KPU akan merilis Daftar Pemilih Sementara (DPS) pertengahan Juni.

Bahkan di tahap setelah dikeluarkan DPS ini, dijelaskan Johan bahwa data pemilih masih dimungkinkan kembali tereduksi. Pasalnya, pasca dikeluarkan DPS masih akan dilakukan pencocokan data. Masyarakat pun diperlihatkan mengecek data. Begitupun KPU akan menerima laporan masyarakat.

Hingga sampai dikeluarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar Agustus nanti baru bisa diketahui jumlah pemilih pasti di wilayah Bantul. "Jadi proses untuk mengarah ke kesesuaian data DP4 dengan fakta di lapangan ini masih cukup jauh, kita sedang berproses ke sana melalui cokolit," kata Johan. (aka/sus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005